



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LENNY WATI MULASIMADHI**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **89450**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **4.650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m²/69 m² di KOTA MANADO ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m²/40 m² di BEKASI, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m²/40 m² di BEKASI, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 532 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
1.200.000.000
5. Tanah Seluas 63 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 1250 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
7. Tanah Seluas 1250 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m²/34 m² di KOTA JAKARTA
BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 22.5 m²/22.5 m² di KOTA JAKARTA
BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
10. Tanah Seluas 15000 m² di SERAM BAGIAN BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **148.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN VIOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
148.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **363.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	221.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.382.500.000
III. HUTANG	Rp.	445.643.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.936.856.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.